

## Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Hasil Referendum Kedaulatan Kepulauan Falkland/Malvinas Tahun 2013

### ABSTRAK

Isu sengketa kedaulatan kepulauan Falkland/Malvinas kembali memanas sejak adanya rencana pengeboran minyak oleh Inggris di perairan Malvinas tahun 2009. Argentina di bawah kepemimpinan presiden Kirchner kembali melakukan klaim terhadap kedaulatan kepulauan ini. Inggris merespon klaim ini dengan mengadakan referendum yang akhirnya dimenangkan oleh Inggris. Amerika Serikat sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan juga sebagai sekutu utama Inggris tetap menyatakan netralitasnya dalam klaim kedaulatan atas kepulauan ini kendati Inggris telah memenangkan referendum. Padahal, Amerika Serikat dan Inggris adalah dua kekuatan besar dengan kedekatan bilateral mutualistik yang kemudian dikenal dengan istilah *Special Relationship*. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh penjelasan mengenai kebijakan luar negeri yang diambil Amerika Serikat dalam menyikapi hasil referendum kepulauan malvinas atau kepulauan Falkland. Analisis terhadap hubungan bilateral Amerika Serikat–Inggris dilakukan dengan menggunakan teori aliansi dalam dunia unipolar dari Stephen M. Walt. Untuk mengetahui intensitas kepentingan Amerika Serikat yang menjadi dasar pengambilan keputusan Amerika Serikat dalam sengketa ini, akan dilakukan analisis dengan pendekatan teori hubungan kepentingan nasional dengan kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Nuechterlein.

Kata kunci : Kebijakan luar negeri, *Special relationship*, aliansi, hubungan bilateral, kepentingan nasional, kebijakan luar negeri.